KULIAH XIII
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Kata pemberdayaan sangat mudah diucapkan tapi sulit diaplikasikan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Hambatan utama dalam memberdayakan masyarakat miskin dirumuskan oleh Ginandjar dalam bentuk bias-bias yaitu : penggunaan paradigm (cara pandang) yang keliru tentang karakteristik penduduk miskin, motivasi mereka, lembaga-lembaga yang dibentuk dan mengatur kehidupan mereka, dan perilaku ekonomi dan social budaya yang diterapkannya.

Bias-bias yang dimaksud adalah

1. Dimensi rasional lebih penting dariapan dimensi moral
2. Pendekatan dari atas lebih unggul lebih baik dari pada aspirasi dari bawah
3. Bantuan material lebih diperlukan daripana teknis dan manajemen
4. Teknologi dari luar lebih ampuh dari teknologi setempat
5. Lembaga yang dikembangkan rakyat tidak efisien dan efektif
6. Masyarakat tidak tau bagaimana memperbaiki nasib
7. Orang miskin karena bodoh dan malas
8. Setiap investasi harus cepat menghasilkan
9. PErtanian tradisional tidak produktif dan menguntungkan
10. Akses masyarakat desa terhadap sumber dana terbatas karena beresiko tinggi.

Meskipun mengembankan ekonomi rakyat jauh lebih rendah biayanya, para ekonomi cenderung bias pemikirannya dengan lebih mempercayai kemampuan sector sebagai lokomotif gerbong ekonomi nasional

Ekonomi rakyat pada dasarnya sudah mampu menyesuaikan diri dengan krisis yang terjadi, karena terbukti ekonomi rakyat punya data tahan yang tinggi

Ekonomi Konglomerasi

Diskusi Panel Ahli Ekonomi KompaS Juli 1999 menerbitkan hasilnya sbb :

1. Kebijakan Ekonomi yang keliru
2. Perbankan jadi alat penjarahan
3. Utang Luar Negeri tetap menjadi bom waktu

Sangat sedikit ekonomi baik dari dalam maupun luar negeri yang menganggap kebijakan ekonomi Indoensia keliru. Sebenarnya banyak kebijakan yang selama ini dianggap benar ternyata bermasalah.

Kebijakan pengetatan uang yang dilakukan dengan penetapan tingkat bunga yang tinggi seperti yang diusulkan IMF hasilnya bisa malah memandegan produksi secara total. Sebab ada factor lain diluar tingkat bunga yang ikut bekerja, shingga hasil yang kita harapkan terjadi dari kebijakan uang ketat ternyata tidak terwujud.

Berdasarkan pengamatan ternyata bank-bank yang bermunculan laksana cendawan di musim hujan setelah diberlakukannya pakto 88 ternyata tidak berkah karena bank-bank tersebut dianggap malah hanya mengeruk dana dari masyakarat. Sehingga pada akhirnya ada 16 bank swasta nasional yang ditutup pada tahun 1998.

Pertanyaannya apakah deregulasi perbankan tahun 1983 dan 1988 dapat dianggap keliru ? Kebijakan deregulasi seharusnya dianggap benar yang salah adalah pelaksanaannya.

Bom waktu yang lebih besar selain hutang yang terlalu besar adalah ketimpangan ekonomi dan kesenjangan social. Padahal Bangsa Indonesia belum mampu memanfaatkan utang luar negeri secara efisien dan produktif.

Ambruknya sector perbankan pada saat krisis ternyata yang dapat dianggap sebagai menjarah uang rakyat ternyata harus dibayar kembali oleh uang rakyat, suatu hal yang terlihat tidak adil.

Apakah kita seharusnya mencari dan menemukan system yang lebih murah ? Yang dapat dibiayai oleh bangsa kita sendiri ?

Diharapkan para pakar ekonomi kita dapat menjawab secara jujur bahwa system ekonomi yang kita jalankan sekarang ini kecil kemungkinannya dapat mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi sebagaimana diukur dengan PDB bukanlah tujuan satu-satunya dari pembangunan . Tujuan lain adalah perbaikan standar hidup (kesejahteraaan) termasuk didalamnya pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan.

Penjelasan pasal 33 UUD 45 dan ketentuan pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sering dianggap sejumlah pakar sebagai isyarat bahwa Indonesia adalah sebuah Negara kesejahteraan (welfare). Namun jika dalam buku-buku barat bentuk Negara kesejahteraan merupakan variasi system ekonomi kapitalisme yang sudah maju maka Negara kesejahteraan social Indonesia adalah Negara dengan system ekonomi kerakyatan.